

Abstract

As the processes of decentralization and regional autonomy progressed in Indonesia following the fall of President Suharto's New Order regime in 1998, illegal logging in Indonesia increased tremendously. It is contended that the transition in forest management authorities caused confusion among the concerned stakeholders which brought in misunderstanding about forestry regulations among the concerned communities and led to opening up illegal activities within the conservation areas. This situation is worsened by the reality that most of communities that live around the forest areas are those with low incomes, categorized as poor, and economically dependent on forest resources. As an effort to solve this problem, since 2004 the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) introduced several community empowerment programs to improve the social economic condition of the communities. However, the impacts of the programs have not yet been conclusive, as the records show that illegal logging are still occurring with an increasing trend despite the implementation of the programs.

This research aimed to analyze illegal logging carried out by the members of Lahai Kemuning village—a village adjacent to Bukit Tiga Puluh National Park (BTPNP) where the MoEF implemented the empowerment program through the installation of Rural Forestry Counselling Center (RFCC) in 2008 but has not still been able to check high number of illegal logging activities. Using the Project Cycle Management (PCM) method, the author reviewed the problematic situation and proposed the community initiative approach as an appropriate option for a more complete engagement with the community. By making a combined effort of (a) increasing the understanding on forestry management regulations; (b) increasing the awareness on the consequences of illegal logging and the possibilities of alternative income generations; and (c) introducing training programs aimed at increasing their income through learning alternative income generating activities, the existing situation will be converted to reducing illegal logging undertaken by Lahai Kemuning community members, the relevance of which were tested by the field interviews to the stakeholders surrounding this issue .

The result of the interviews suggests that the increasing awareness of the Lahai Kemuning community members on the forestry management regulations will contribute to the reduction of illegal activities, but stand-alone effort of awareness building may not be sufficient to prevent illegal logging. In addition, ensuring the understanding of both the negative effect of excessive deforestation and many positive possibilities from reducing or eliminating deforestation is necessary in order to eventually prevent Lahai Kemuning community members from returning to practice illegal logging. The interview results also revealed that if alternatives income generation activities can provide adequate finance to fulfill their needs for the long run, the Lahai Kemuning community members will eventually quit committing illegal logging altogether. With regard to the income generating activities, however, it is important to analyze the characteristics of the community and use them as the criteria to judge their relevance rather than simply replicating the successful practices established in different part of Indonesia. For the analysis of the community, time series event analysis, geographical and spatial constraints and strength analysis, and

social relationship analysis of the influential stakeholders in the community would be essential.

In conclusion, this research verified that the combination of (a) increasing the understanding on forestry management regulations; (b) increasing the awareness on the consequences of illegal logging and the possibilities of alternative income generations; and (c) introducing training for their income through learning alternative income generating activities, were the option which is acceptable by the stakeholders at this moment to reduce illegal logging carried out by Lahai Kemuning community members.

This research, being action research in its nature, suggests possible actions for problem solving under the existing circumstances, whose relevance will be finally verified by the actual implementation. The detailed verification will be conducted by the Ph.D. thesis based on the field gathered implementation result data to be gathered in its implementation.

Keywords: illegal logging, conservation area, national park, community empowerment

Abstrak

Ketika proses desentralisasi dan otonomi daerah berkembang di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, penebangan liar di Indonesia meningkat luar biasa. Transisi pada otoritas pengelolaan hutan menimbulkan kebingungan di antara para pemangku kepentingan terkait serta membawa kesalahpahaman tentang peraturan kehutanan pada masyarakat, dan menyebabkan meningkatnya kegiatan ilegal di dalam kawasan konservasi. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan adalah mereka yang berpenghasilan rendah, dikategorikan sebagai miskin, dan secara ekonomi bergantung pada sumber daya hutan. Sebagai upaya untuk memecahkan masalah ini, sejak tahun 2004 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkenalkan beberapa program pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, dampak dari program tersebut belum konklusif, karena catatan menunjukkan bahwa pembalakan liar masih terjadi dengan kecenderungan yang meningkat meskipun program pemberdayaan telah diimplementasikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota Desa Lahai Kemuning—sebuah desa yang berdekatan dengan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) di mana KLHK melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) pada tahun 2008 tetapi masih belum bisa menekan jumlah aktivitas pembalakan liar yang tinggi. Dengan menggunakan metode Project Cycle Management (PCM), penulis meninjau situasi yang bermasalah dan mengusulkan pendekatan inisiatif masyarakat sebagai pilihan yang tepat untuk keterlibatan yang lebih lengkap dengan masyarakat. Dengan melakukan upaya gabungan (a) meningkatkan pemahaman tentang peraturan manajemen kehutanan; (b) meningkatkan kesadaran akan konsekuensi penebangan liar dan kemungkinan-kemungkinan pendapatan alternatif; dan (c) memperkenalkan program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan pembelajaran yang menghasilkan pendapatan alternatif, situasi yang ada akan dikonversi untuk mengurangi pembalakan liar yang dilakukan oleh anggota masyarakat Lahai Kemuning, yang relevansinya akan diuji melalui wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan masalah ini.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran anggota masyarakat Lahai Kemuning tentang peraturan pengelolaan kehutanan akan berkontribusi pada pengurangan kegiatan ilegal, tetapi upaya membangun kesadaran yang berdiri sendiri mungkin tidak cukup untuk mencegah pembalakan liar. Selain itu, memastikan pemahaman tentang efek negatif dari deforestasi yang berlebihan dan banyak kemungkinan positif dari mengurangi atau menghilangkan deforestasi diperlukan untuk akhirnya mencegah anggota masyarakat Lahai Kemuning kembali melakukan penebangan liar. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa jika kegiatan penghasil pendapatan alternatif dapat memberikan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk jangka panjang, anggota masyarakat Lahai Kemuning akhirnya akan berhenti melakukan penebangan liar sama sekali. Berkenaan dengan kegiatan menghasilkan pendapatan, bagaimanapun, penting untuk menganalisis karakteristik masyarakat dan menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai relevansi mereka daripada hanya mereplikasi praktik-praktik sukses yang

ditetapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Untuk analisis masyarakat, analisis serial waktu (*time series*), analisis geografis dan spasial, dan analisis hubungan sosial dari para pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam masyarakat akan sangat penting.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi (a) meningkatkan pemahaman tentang peraturan manajemen kehutanan; (b) meningkatkan kesadaran akan konsekuensi penebangan liar dan kemungkinan-kemungkinan pendapatan alternatif; dan (c) memperkenalkan pelatihan untuk pendapatan mereka melalui pembelajaran kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan alternatif, adalah pilihan yang dapat diterima oleh para pemangku kepentingan saat ini untuk mengurangi penebangan liar yang dilakukan oleh anggota masyarakat Lahai Kemuning.

Kata kunci: illegal logging, kawasan konservasi, taman nasional, pemberdayaan masyarakat